

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat padat akan penduduknya. Dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak baik itu orang pribadi maupun badan. Apabila semua wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, tentu akan semakin besar pendapatan negara dari sektor pajak karena sumber penerimaan negara yang besar berasal dari sektor pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak meskipun tidak secara langsung mendapat jasa timbal balik dari pemerintahan.

Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2013:1) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Surabaya adalah salah satu kota yang besar dan padat penduduknya, disamping itu terdapat banyak tempat hiburan yang rame di kunjungi oleh warga kota Surabaya. Oleh sebab itu, maka perlu untuk di optimalkan pemungutan Pajak Daerah dari beberapa tempat hiburan yang beroperasi di kota Surabaya guna untuk menambah penghasilan Penerimaan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya untuk kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Kepala Daerah yang salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

Pajak Daerah selanjutnya yang dapat disebut pajak yakni kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut ketentuan Undang – Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari pemerintahan dan digunakan untuk pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat daerah kota Surabaya.

Ada beberapa jenis pajak daerah yang merupakan sektor dari penerimaan daerah kota Surabaya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan itu sendiri memiliki arti yaitu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

Ada banyak jenis obyek pajak hiburan yang dapat dipungut di Kota Surabaya, salah satunya yang termasuk dalam jenis obyek pajak hiburan yaitu diskotik, karaoke dan club malam, panti pijet, refleksi dsb. Dengan ditetapkannya tarif sebesar 50% untuk diskotik, karaoke, club malam, panti pijat maupun refleksi yang harus dibayarkan oleh badan penyelenggara hiburan kepada daerah sebagai penerimaan daerah melalui sektor pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah kota Surabaya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Prosedur Pemungutan Pajak

Daerah Terhadap Obyek Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan dari studi lapang ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak daerah terhadap obyek pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat dari studi lapang adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan instansi terkait.
 - b. Sarana memperoleh informasi terkait dengan kondisi keadaan lingkungan instansi secara umum.
 - c. Mampu menghasilkan lulusan yang berpengalaman di bidang perpajakan.
2. Bagi Instansi Terkait
 - a. Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi dan perguruan tinggi.
 - b. Dapat membantu sedikit meringankan beban pekerjaan dengan adanya mahasiswa praktek kerja lapang.
 - c. Sebagai sarana menjembatani antara instansi terkait dengan perguruan tinggi untuk bekerjasama lebih lanjut nantinya.
3. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana pelatihan di dalam dunia kerja.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman di dalam dunia kerja yang nantinya akan dihadapi secara langsung di masa yang akan datang.
- c. Sebagai syarat kelulusan memperoleh gelas Ahli Madya.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu obyek permasalahan yang nantinya agar tidak meluas topik dari pembahasan dan pembahasan akan lebih merata sehingga penulis melakukan pembahasan berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, ruang lingkup studi lapang ini akan membahas Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Obyek Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi :

1. Metode Observasi

Kegiatan mengumpulkan dan mencari data secara langsung dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan pencatatan, pengamatan, mendengar dan meneliti bagaimana Prosedur pemungutan pajak daerah terhadap obyek pajak hiburan.

2. Metode Wawancara

Kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara wawancara kepada pembimbing eksternal secara langsung yang berkompeten di lapangan guna mendapatkan informasi untuk mendukung mengisi hasil penulisan Tugas Akhir.

3. Metode Dokumentasi

Mencari dan mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta penulis melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan yang ada seperti di perpustakaan, Undang – Undang Perpajakan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011, dan sumber lainnya yang mendukung.

